Indikator Ekonomi

Kabupaten Sidoarjo

Tahun

2022

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo

Indikator Ekonomi

Kabupaten Sidoarjo

Tahun

2022

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo

Indikator Ekonomi

Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2022

INDIKATOR EKONOMI
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pembangunan harus terus menerus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi. Seluruh tahapan proses pembangunan tersebut tentunya sangat memerlukan berbagai indikator sebagai benchmark dari keberhasilan pembangunan tersebut.

Publikasi ini memuat analisis deskriptif dari berbagai indikator ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Beberapa indikator ekonomi pada publikasi ini antara lain: Keuangan Daerah, Produksi (Industri dan Padi), Produk Domestik Regional Bruto, Gini Ratio, Analisis *Location Quotient* (LQ), Model rasio Pertumbuhan (MRP), Perhotelan, dan Perhubungan. Data pendukung dalam publikasi ini berasal dari beberapa sumber yaitu Badan Pusat Statistik serta data pendukung dari instansi terkait di Kabupaten Sidoarjo.

Kami sangat berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini. Semoga publikasi ini manfaat bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, Oktober 2022
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo,

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar v
Daftar Isi vi
Daftar Tabel vii
Daftar Gambar viii
1. Indikator Ekonomi dan Pembangunan 1
2. Ruang Lingkup Indikator Ekonomi 3
1. Keuangan Daerah 17
2. Produksi 21
3. Produk Domestik Regional Bruto..... 31
4. Gini Ratio 47
5. Hotel dan Pariwisata..... 51
6. Perhubungan..... 55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Belanja Tahun 2018–2020 (Juta Rupiah) 17

Tabel 2. Jumlah Perusahaan Industri Besar-Sedang di Kab. Sidoarjo menurut Kecamatan Tahun 2020 22

Tabel 3. Persentase Perusahaan Industri Besar-Sedang menurut Jenisnya di Kabupaten Sidaorjo Tahun 2020 24

Tabel 4. Distribusi Produk Domestik Reginal Bruto ADHB Kab. Sidoarjo Tahun 2019–2020 33

Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Sidoarjo Tahun 2020 37

Tabel 6. Analisis Location Quotient (LQ) Menurut Lapangan Usaha Kab. Sidoarjo Tahun 2020 39

Tabel 7. Analisis MRP (Model Rasio Pertumbuhan) Menurut Lapangan Usaha Kab. Sidoarjo Tahun 2020 41

Tabel 8. Analisis Location Quotient (LQ) dan MRP (Model Rasio Pertumbuhan) Menurut Lapangan Usaha Kab. Sidoarjo Tahun 2020 46

Tabel 9. Rata-Rata Lama Menginap Tamu Luar Negeri dan Domestik Pada Hotel Berbintang 52

Tabel 10. Tingkat Penghunian Kamar (%) Hotel Berbintang Kab. Sidoarjo Tahun 2019-2020 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kurva Lorentz 15

Gambar 2. Luas Panen Padi Bulanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2019-2020 (Ribuan Hektar) 27

Gambar 3. Konsumsi (Ton Beras) dan Produksi (Ton Beras) Kab. Sidoarjo Tahun 2019 –2020 29

Gambar 4. Surplus/Defisit Beras menurut Subround di Kab. Sidoarjo Tahun 2019–2020 30

Gambar 5. Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Positif di Kab. Sidoarjo Tahun 2020 35

Gambar 6. Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Negatif (Kontraksi) di Kab. Sidoarjo Tahun 2020 36

Gambar 7. Gini Rasio Kab. Sidoarjo Tahun 2020 48

Gambar 8. Jumlah Penumpang Pesawat Udara Tahun 2020-2021 dan Pertumbuhan Jumlah Penumpang (*year-on-year*) 56

Indikator Ekonomi dan Pembangunan

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengarahkan pembagian pendapatan masyarakat yang semakin merata, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan usaha menggeser (peranan) dari kegiatan yang dominan di sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Untuk melaksanakan pembangunan dengan lebih terarah, maka pemerintah bersama-sama masyarakat telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020. Visi dan misi tersebut tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Sidoarjo dan bukan hanya menyentuh wilayah maupun kelompok masyarakat tertentu.

RPJP Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat setempat dan berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan masyarakat bagi semua pihak di Kabupaten Sidoarjo. Agenda dan prioritas pembangunan yang telah disusun dan dirancang di dalam RPJMD akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan

pemerintahan saat ini maupun tahun mendatang. Pada akhirnya pembangunan yang telah dilaksanakan akan mewujudkan kemakmuran bersama serta tidak boleh ada yang terpinggirkan dari proses dan hasil pembangunan.

Untuk mewujudkan program/kegiatan perencanaan yang sesuai dengan visi, misi dan strategi pembangunan Kabupaten Sidoarjo, sangat diperlukan dukungan data statistik yang akurat, lengkap dan terkini. Data statisktik tersebut akan menjadi suatu instrumen yang sangat berguna untuk memonitor proses pembangunan yang sedang berjalan maupun sebagai alat evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui Keputusan Bupati Nomor: 188/732/438.1.1.3/2019 Tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan kristalisasi terhadap lebih dari seratus indikator pembangunan menjadi 10 (sepuluh) indikator kinerja utama. Sepuluh indikator tersebut antara lain Indeks Good Governance, Indeks Reformasi Birokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kebahagiaan, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Penetapan sepuluh indikator kinerja utama digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilias kinerja, evaluasi kinerja dan pemantauan serta pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Ruang Lingkup Indikator Ekonomi

Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang diubah menjadi Pergemndagri No. 21 Tahun 2011, kelompok belanja terdiri atas:

a) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:

- Belanja Pegawai

  Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang atau dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS), pejabat negara, pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS yang ditetapkan berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Bunga

  Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- Subsidi

  Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/

lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

- Hibah

  Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah dan dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

- Bantuan Sosial

  Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

- Belanja Bagi hasil

  Belanja Bagi Hasil sebagaimana digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

- Bantuan Keuangan

  Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi daerah dan/ atau desa penerima bantuan.

- Belanja Tidak Terduga

  Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/ tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

- Belanja Langsung

  Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- Belanja Pegawai

  Belanja pegawai pada kelompok ini meliputi pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

- Belanja Barang dan Jasa

  Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/ pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- Belanja Modal

  Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Luas Lahan

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut. Termasuk disini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil Bumi, Iuran Pembangunan

Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan-lahan bukaan baru. Lahan sawah mencakup pengairan, tadah hujan, sawah pasang surut, rembesan, lebah dan lain sebagainya.

Luas Panen

Luas panen berhasil (Luas panen) adalah tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Dalam panen berhasil ini termasuk juga tanaman yang hasilnya sebagian saja dapat dipungut (paling sedikit sampai dengan 11%) yang mungkin disebabkan karena mendapat serangan organisme pengganggu tumbuhan atau bencana alam. Mencabut bibit ini tidak termasuk sebagai memungut hasil dan tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan luas panen.

Produksi

Estimasi rata-rata jumlah beras yang dapat dihasilkan pada periode tertentu.

Konsumsi

Estimasi rata-rata jumlah beras yang dikonsumsi masyarakat pada periode tertentu.

Surplus/Defisit

Selisih jumlah beras yang dikonsumsi dengan jumlah beras yang dapat diproduksi pada periode tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisinya, PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu

tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Jadi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara Agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/ balas jasa kepada faktor-faktor produksi di daerah tersebut, atau merupakan “PRODUCTION ORIGINATED”.

Nilai barang dan jasa dalam PDRB adalah yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanyan tahunan atau

Nilai Tambah = Output – Biaya Antara

triwulanan). Rebasing (pergeseran tahun dasar terakhir) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam 17 kategori lapangan usaha, yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya

PDRB disajikan dalam dua dasar penghitungan:

a. **Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)**, yaitu penyajian PDRB yang menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. PDRB ADHB digunakan untuk melihat struktur perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu.

b. **Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**, yaitu penyajian PDRB yang menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu (disebut tahun dasar) fungsinya agar perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan perkembangan riil dari kuantum produksi dan sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). PDRB ADHK digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi.

Analisis *Location Quotient* (LQ) dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) merupakan suatu metode statistik yang menggunakan karakteristik output/nilai tambah atau kesempatan kerja untuk menganalisis dan menentukan keberagaman dari basis ekonomi (economic base) masyarakat daerah/lokal (Arsyad, 1999). Sementara itu yang termasuk kedalam basis ekonomi masyarakat adalah sektor-sektor yang memiliki karakteristik menyangkut tentang pendapatan dan kesempatan kerja. Analisis LQ memberikan kerangka pengertian tentang stabilitas dan fleksibilitas perekonomian masyarakat untuk merubah kondisi melalui penyelidikan terhadap derajat industri-industri/sektor-sektor yang ada dilingkungan masyarakat (Heilbrun, 1987 dalam Kharisma dan Hardiyanto, 2020).

Analisis LQ sering digunakan untuk mengestimasi industri ekspor atau basic industry, dimana industri tersebut memiliki karakteristik dapat membawa sejumlah unit uang kepada masyarakat melalui ekspor barang dan jasa, industri yang seperti ini kemudian dikenal dengan nama industri-industri basis (basic industries). Sementara itu industri-industri yang bergerak men-supply barang dan jasa untuk kegunaan konsumsi lokal/daerah dinamakan sebagai industri-industri non basis.

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Arsyad (1999) mengatakan bahwa model rasio pertumbuhan merupakan alat untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial dengan formula:

- Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs)

RPs adalah: perbandingan antara laju pertumbuhan pendapatan/tenaga kerja kegiatan *i* wilayah studi dengan laju pertumbuhan pendapatan/tenaga kerja kegiatan *i* di wilayah referensi.

- Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr)

  RPr adalah: perbandingan antara laju petumbuhan pendapatan / tenaga kerja kegiatan i di wilayah referensi dengan laju pertumbuhan total kegiatan (PDRB) / total tenaga kerja wilayah referensi.

Berbeda dengan analisis LQ, analisis MRP menggunakan basis pertumbuhan dimana perhitungan pertumbuhan tidak selalu positif. Oleh karena itu, Yusuf (1999) menyebutkan beberapa permasalahan yang mungkin timbul dari analisis MRP sebagai berikut:

- Jika RPr dan RPs dimana pembilang (+) dan penyebut (+), maka analisis dapat dilakukan langsung yaitu (=) untuk > 1 dan (-) untuk < 1.
- Jika RPr dan RPs dimana pembilang (+) dan penyebut (-), maka analisis langsung memberikan nilai (+).
- Jika RPr dan RPs dimana pembilang (-) dan penyebut (+), maka analisis langsung memberikan nilai (-).
- Jika RPr dan RPs dimana pembilang (-) dan penyebut (-), perlu dilakukan pertimbangan yang lebih jauh mengingat ada dua kemungkinan yaitu:
  1. Pembilang > penyebut, maka analisis memberikan nilai (+)
  2. Pembilang < penyebut, maka analisis langsung memberikan nilai (-)
- Jika RPr dan RPs mempunyai nilai dan tanda yang sama maka pengertiannya adalah sama seperti analisis LQ dan interpretasi tanda (+) atau (-) ditentukan

tergantung dari data *existing* yang tersedia.

Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (absolute) yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu cukup lama. Sejalan dengan kenaikan tersebut, nilai uang turun secara tajam sebanding dengan kenaikan harga-harga barang tersebut. Inflasi dapat dihitung dengan banyak pendekatan, untuk Kabupaten Sidoarjo inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK adalah adalah indeks yang diperoleh dari hasil perbandingan Nilai Konsumsi pada bulan berjalan dengan Nilai Konsumsi dasar Kabupaten Sidoarjo dari hasil penghitungan dan penyesuaian dari hasil SBH-2018 Kota Surabaya.

$$Inflasi_t = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} x100 \qquad (11)$$

dimana:

IHK_t = Indeks Harga Konsumen tahun ke-t

$IHKt_{-1}$= Indeks Harga Konsumen tahun ke-t-1

$Inflasi_t$= Inflasi Tahun ke-t

Perhotelan

Kegiatan perhotelan dan pariwisata masuk ke dalam jenis usaha akomodasi.

Usaha akomodasi adalah suatu usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian dari bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lain dengan pembayaran. Secara garis besar usaha akomodasi dibedakan menjadi dua golongan yaitu hotel bintang dan usaha akomodasi lainnya.

Hotel Bintang adalah usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian dari bangunan yang disediakan secara khusus, setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata antara lain keadaan fisik, seperti lokasi hotel dan kondisi bangunan, pelayanan yang diberikan, serta sarana rekreasi atau olah raga yang disediakan seperti lapangan tenis, kolam renang dan diskotik. Ciri khusus hotel bintang adalah mempunyai restoran yang berada di bawah manajemen hotel tersebut.Hotel bintang dirinci menjadi Bintang 1, Bintang 2, Bintang 3, Bintang 4 dan Bintang 5.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia (dalam persen) 27. Rata-Rata Lama Menginap Tamu (RLMT) Adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang datang menginap

Usaha Akomodasi Lainnya adalah semua usaha akomodasi yang tidak termasuk hotel bintang yang terdiri atas hotel melati, penginapan remaja (youth hostel), pondok wisata (home stay), perkemahan dan jasa akomodasi lainnya seperti motel, losmen, penginapan dan sejenisnya.

Gini Rasio

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah sebuah ukuran yang menunjukkan apakah pendistribusian dari pendapatan merata secara nyata. Koefisien Gini merupakan rasio antara garis 45 derajat dengan Kurva Lorenz dan area dalam segitiga. Koefisien ini bernilai 0 (nol), jika distribusi menyebar merata secara nyata, dan mendekati 1 (satu), jika secara nyata menyebar tidak merata. Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1 (digunakan dalam bahasan ini), atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36.

Untuk mendapatkan Gini rasio, data yang digunakan adalah data rata-rata pengeluaran perkapita sebulan yang lalu dari hasil Susenas. Data tersebut diurutkan berdasarkan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan dari yang terendah sampai tertinggi. Selanjutnya data tersebut dikelompokkan menjadi lima kelompok penduduk yang jumlahnya sama besar, berdasarkan urutan tersebut. Kemudian dihitung persentase total pengeluaran untuk tiap kelompok. Dengan metode ini, selain dapat diperoleh Koefisien Gini, juga dapat diperoleh indikator distribusi pendapatan (pengeluaran) menurut Bank Dunia. Bentuk umum dari Kurva Lorenz yang menggambarkan antara kumulatif penduduk dengan kumulatif pengeluaran adalah seperti gambar berikut:

Gambar 1 Kurva Lorentz

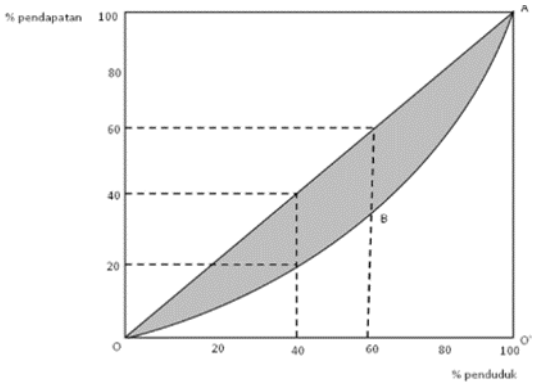

Data yang diperoleh kemudian dilakukan *scatter plot*, dengan terlebih dahulu mengkumulatifkan total pengeluaran perkapita, sehingga akan diperoleh hasil plot seperti Gambar 1 Formula untuk menghitung Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$\textit{Gini Ratio} = \frac{\textit{Luas daerah yang terletak di antara OA dan OAB}}{\textit{Seluruh daerah OAO'}}$$

Atau,

$$\textit{Gini Ratio} = \sum_{k=1}^{n-1} C_{k+1} P_k - \sum_{k=1}^{n-1} C_k P_{k+1}$$

Dimana,

C = Persentase kumulatif konsumsi,
P = Persentase kumulatif penduduk,
k = Kelompok kelas ke- (1,2,3,...,n).

1 Keuangan Daerah

Struktur anggaran/belanja daerah mencerminkan besar kecilnya upaya pemerintah daerah dalam upaya pembangunan. Setiap negara/wilayah memiliki keterbatasan pada bidang tertetu, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif secara kreatif dan inovatif. Struktur belanja daerah secara keseluruhan sedikit banyak akan memberikan gambaran mengenai arah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai struktur anggaran/ belanja daerah dalam menunjang pembangunan berikut disajikan secara rinci melalui Tabel 1:

Tabel 1. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Belanja Tahun 2019–2021 (Juta Rupiah)

No	Jenis Belanja	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Belanja Tidak**	**2,391,171**	**2,349,233**	**2,603,633.75**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab Sidoarjo Tahun 2021

Tabel 1. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Belanja Tahun 2019–2021 (Juta Rupiah) (Lanjutan)

No	Jenis Belanja	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Belanja Tidak Lang-**	**2,391,171**	**2,349,233**	**2,603,633.75**
	1.1. Belanja Pegawai	1,490,511	1,286,796	1,620,047.24
	1.2. Belanja Bunga	-	-	-
	1.3. Belanja Subsidi	-	-	4,563.49
	1.4. Belanja Hibah	211,250	258,001	147,342.92
	1.5. Belanja Bantuan	82,385	86,332	
	1.6. Belanja Bagi Hasil	115,583	92,531	103,200.57
	1.7. Belanja Bantuan	447,815	493,492	561,681.40
	1.8. Belanja Tidak	43,628	132,081	56,550.69
2	**Belanja Langsung**	**3,031,953**	**2,092,441**	**2,089,506.63**
	2.1. Belanja Pegawai	261,871	274,665	264,987.50
	2.2. Belanja Barang dan Jasa	1,464,886	1,298,523	1,143,430.37
	2.3. Belanja Modal	1,305,196	519,253	919,008.76
Jumlah		**4,188,537.8**	**5,423,124.4**	**4,693,140.38**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab Sidoarjo Tahun 2021

Pada kondisi normal, rata-rata realisasi belanja pemerintah daerah berkisar antara 3,7 – 4,00 triliun rupiah setiap tahunnya. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan realisasi belanja pemerintah pada tahun 2020 naik sekitar 6 persen jika dibanding dengan rata-rata tahun sebelumnya. Hal tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam penanganan pandemi covid-19 mulai dari memberikan bantuan sosial, bantuan keuangan, maupun belanja tidak langsung lainnya yang tidak tertera dalam rencana anggaran.

Berdasarkan Tabel 1 nilai belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan paling tinggi terdapat pada tahun 2021. Pandemi membuat aktivitas masyarakat menjadi sangat terbatas baik secara sosial maupun ekonomi, oleh karena itu untuk menjamin kesejahteraan masyarakat selama pandemi (khususnya masyarakat kelompok miskin dan rentan miskin) pemerintah daerah memberikan beragam bantuan mulai dari bantuan sosial, ekonomi, dan lain sebagiannya.

2 Produksi

Industri

Industri pengolahan merupakan *leading sector* kegiatan perekonomian di Kabupaten selama lebih dari satu dekade terakhir, bahkan setelah terjadinya kontraksi perekonomian akibat Pandemi Covid-19 indusri pengolahan tetap menjadi sektor dengan kontribusi tertinggi. Nilai tambah yang dihasilkan sektor industri pengolahan pada tahun 2020 mencapai 100.918 miliar rupiah. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 51,97 persen terhadap nilai PDRB pada tahun 2021.

Kontraksi perekonomian menyebabkan penurunan nilai tambah dan perlambatan pertumbuhan hampir pada semua lapangan usaha, meskipun begitu kontribusi lapangan usaha industri pengolahan tetap tinggi. Pada tahun 2019 misalnya kontribusi sektor industri pengolahan adalah 47,86 persen, tahun 2020 naik 3,31 persen menjadi 51,17 persen, dan pada tahun 2021 naik lagi sebesar 0,08 persen menjadi 51,97 persen.

Prediksi bahwa ekonomi akan membaik kembali pada tahun 2021 dibuktikan dengan kenaikan signifikan PDRB sektor industri pengolahan di Kab. Sidoarjo, dimana sebelumnya pandemi covid-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha industri pengolahan. Pada tahun 2019 tumbuh sebesar 8,89 persen, kemudian tahun 2020 hanya tumbuh sebesar 0,98 persen.

Besar kecilnya kontribusi dan pertumbuhan nilai tambah ditentukan oleh banyaknya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan, dimana jumlah perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan pada tahun 2020 adalah sekitar 961 perusahaan, tumbuh sebesar 15 persen menjadi 1106 perusahaan pada taun 2021. Berdasarkan jumlah karyawan, industri pengolahan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu industri sedang (0 – 99 karyawan) dan industri besar (> 100 karyawan). Berikut jumlah industri besar-sedang di Kabupaten Sidoarjo menurut kecamatan:

Tabel 2. Jumlah Perusahaan Industri Besar-Sedang di Kab. Sidoarjo menurut Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Tarik	4	4
Prambon	10	12
Krembung	17	14
Porong	7	10
Jabon	14	15
Tanggulangin	29	33
Candi	44	49
Tulangan	14	20
Wonoayu	34	41

Sumber: Survei Industri Besar Sedang Tahun 2021

Tabel 2. Jumlah Perusahaan Industri Besar-Sedang di Kab. Sidoarjo menurut Kecamatan Tahun 2021 (Lanjutan)

Kecamatan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Sukodono	28	33
Sidoarjo	70	86
Buduran	80	96
Sedati	19	23
Waru	200	230
Gedangan	145	166
Taman	144	156
Krian	60	65
Balongbendo	42	53
SIDOARJO	961	1106

Sumber: Survei Industri Besar Sedang Tahun 2021

Berdasarkan data pada Tabel 2 Kecamatan Waru, Gedangan, dan Taman merupakan kecamatan dengan jumlah perusahaan industri besar-sedang terbesar dimana lebih dari 400 perusahaan terdapat di tiga kecamatan tersebut. Oleh karena itu, tiga kecamatan tersebut menjadi wilayah sentra industri di Kabupaten Sidoarjo. Banyaknya jumlah industri pengolahan pada wilayah tersebut berkaitan dengan letak geografis Kabupaten Sidoarjo yang berdampingan dengan Kota Surabaya dan juga objek-objek penting perekonomian (bandara, terminal, dsb) yang terletak diwilayah tersebut.

Kemudian bila dilakukan pemetaan menurut kategori/jenis usahanya, Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan makanan dan minuman. Kondisi tersebut sesuai dengan data pada Tabel 3 dimana terdapat 241 perusahaan yang bergerak dibidang terkait, dimana jumlah tersebut

merupakan 21,79 persen dari total keseluruhan perusahaan industri pengolahan di Kabupaten Sidoarjo. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang berkembang dan potensial setelah terjadinya kontraksi perekonomian akibat pandemi, hal tersebut terlihat dari kenaikan jumlah perusahaan yang bergerak dibidang tersebut yaitu sebesar 9 persen terhadap tahun 2020.

Selengkapnya jumlah perusahaan industri besar-sedang menurut jenisnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Persentase Perusahaan Industri Besar-Sedang menurut Jenisnya di Kabupaten Sidaorjo Tahun 2020—2021

Jenis Industri Besar Sedang	2020		2021	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan dan Minuman	221	22.99	241	21.79
Pengolahan Tembakau	16	1.66	22	1.99
Tekstil dan Pakaian Jadi	39	4.06	45	4.07
Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	72	7.49	67	6.06
Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan,	20	2.08	30	2.71
Kertas dan Barang dari Kertas	42	4.37	46	4.16
Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	34	3.54	38	3.43
Produk dari Batubara dan Penggilingan Minyak Bumi	4	0.42	3	0.27
Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	61	6.35	76	6.87
Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	12	1.25	14	1.27
Karet, Barang dari Karet dan Plastik	127	13.22	158	14.29

Sumber: Survei Industri Besar Sedang Tahun 2021

Tabel 3. Persentase Perusahaan Industri Besar-Sedang menurut Jenisnya di Kabupaten Sidaorjo Tahun 2020–2021 (Lanjutan)

Jenis Industri Besar Sedang	2020		2021	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Barang Galian Bukan Logam	32	3.33	40	3.62
Logam Dasar	17	1.77	21	1.90
Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya	83	8.64	96	8.68
Komputer, Barang Elektronik, dan Optik	10	1.04	7	0.63
Peralatan Listrik	26	2.71	37	3.34
Mesin dan Perlengkapan	39	4.06	42	3.80
Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	22	2.29	22	1.99
Alat angkutan Lainnya	13	1.35	16	1.45
Furnitur	47	4.89	51	4.61
Pengolahan Lainnya	22	2.29	28	2.53
Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	2	0.21	6	0.54
Jumlah	961	100	1106	100

Sumber: Survei Industri Besar Sedang Tahun 2021

Dominasi industri makanan dan minuman tersebut membuat peranannya terhadap PDRB Kab. Sidoarjo tahun 2021 sangat tinggi yaitu 23,91 persen terhadap total PDRB tahun 2021 atau sekitar 50,361 miliar rupiah.

Jenis/kategori industri terbesar selanjutnya adalah industri karet, barang dari karet, dan plastik dengan jumlah perusahaan adalah 158 diikuti oleh perusahaan barang logam, bukan mesin, dan peralatannya sebagai kategori tertinggi selanjutnya dengan jumlah perusahaan yang terdapat di Kab. Sidoarjo sebesar 96 perusahaan.

Sedangkan sebagai wilayah bukan potensi sumber daya alam tidak terbaharukan membuat jumlah perusahaan yang bergerak pada bidang tetkait (produk dari batubara dan penggalian minyak bumi) di Kabupaten Sidoarjo jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan jenis/kategori lainnya. Negara/wilayah tertentu memiliki spesialisasinya masing-masing sehingga komponen yang diproduksi juga akan berbeda, oleh karena itu jenis.kategori usaha yang dijalankan perusahaan di Kabupaten Sidoarjo sangat bervariasi.

Padi

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran penting dalam menunjang ekonomi berkelanjutan, khususnya pada tujuan dua yaitu tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian berkelanjutan.

Sejak tahun 2018 BPS melakukan estimasi luas panen baik padi maupun palawija dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA). KSA didefinisikan sebagai teknik pendekatan penyampelan yang menggunakan area lahan sebagai unit enumerasi. Sistem ini berbasis teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG), penginderaan jauh, teknologi informasi, dan statistika yang saat ini sedang diimplementasikan di Indonesia untuk perolehan data dan informasi pertanian tanaman pangan. Pendekatan KSA diharapkan mampu menjawab penyediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan Program Ketahanan Pangan Nasional.

Luas Panen

Berdasarkan hasil survei KSA, terdapat perbedaan cukup signifikan terkait luas panen di Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2020 dan tahun 2021, dimana pada tahun 2020 total luas panen adalah 34,32 ribu hektar, sedangkan pada tahun 2021 adalah 32,48 ribu hektar. Jumlah tersebut menurun sebesar 5,36 persen dibanding tahun 2020. Penurunan luas panen padi disebabkan beberapa hal antara lain intensitas kemarau yang tinggi sepanjang bulan Agustus–Oktober, gangguan hama yang terjadi di banyak titik, serta peralian ke tanaman lain selain padi.

Berdasarkan tren data yang dihasilkan, baik tahun 2020 dan tahun 2021, luas panen memiliki titik tertinggi pada bulan Mei dan Oktober. Titik puncak tersebut menandakan bahwa pada periode Mei dan Oktober sedang terjadi panen raya.

Setelah fase panen raya berakhir (bulan September–Desember) maka selanjutnya akan masuk ke fase persiapan lahan (Januari–April) sehingga pada bulan Januari–April umumnya menjadi *subround* dengan luas panen terendah. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan luas panen dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut:

Gambar 2. Luas Panen Padi Bulanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2021 (Ribuan Hektar)

Sumber: Hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Tahun 2021

Produksi dan Konsumsi

Total produksi beras pada tahun 2021 turun sebesar 5,91 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari 120,12 ribu ton beras menjadi 113,02 ribu ton beras berbanding terbalik dengan tingkat konsumsi yang terus mengalami kenaikan.

Pada tahun 2020 konsumsi masyarakat adalah 248,09 ribu ton beras, sedangkan pada tahun 2021 menjadi 251,08 ribu ton beras. Artinya selama periode tahun 2020–2021 konsumsi masyarakat mengalami kenaikan sebesar 1,2 persen.

Produksi dan konsumsi beras di Kabupaten Sidoarjo pada periode 2020–2021 selalu mengalami defisit salah satu penyebabnya adalah sektor pertanian memiliki rasio yang lebih rendah jika dibandingkan sektor industri, selain itu rasio jumlah penduduk dengan ketersediaan lahan yang tidak seimbang juga menjadi penyebab defisit beras pada periode terbut dan sebelumnya.

Produksi beras tertinggi pada tahun 2021 terjadi pada bulan April yaitu sebesar 45 ribu ton beras, sedangkan produksi terendah terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 0,89 ribu ton beras. Untuk konsumsi masyarakat secara tren cenderung tetap, dimana jumlah konsumsi tertinggi masyarakat adalah sebesar 21,637 ribu ton beras dan konsumsi terendahnya adalah 19,261 ribu ton beras yang terjadi pada bulan Februari.

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan konsumsi dan produksi dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut:

Gambar 3. Konsumsi (Ton Beras) dan Produksi (Ton Beras) Kab. Sidoarjo Tahun 2019–2020

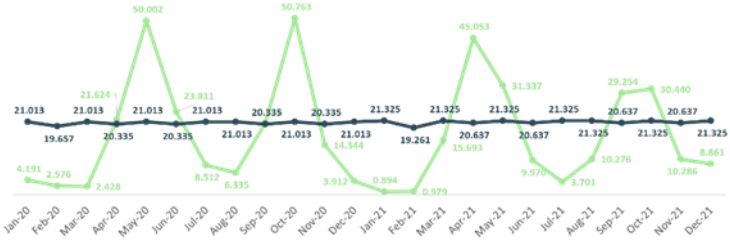

Sumber: Hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Tahun 2020

Surplus/Defisit

Berdasarkan penjelasan pada uraian sebelumnya, selama periode 2020–2021 produksi beras terus mengalami penurunan, namun tingkat konsumsi masyarakat terus mengalami peningkatan. Artinya selama periode 2020–2021 Kabupaten Sidoarjo mengalami defisit sumber pangan berupa padi.

Gambar 4 menyajikan grafik besarnya defisit produksi beras yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2020–2021. Berdasarkan gambar tersebut, tahun 2021 fase defisit terbesar terjadi pada *subround* kedua (*Subround* II) yaitu pada bulan Mei–Agustus, sedangkan fase defisit terendah terjadi pada *subround* ketiga (*Subround* III) yaitu pada bulan September–Oktober.

Untuk lebih jelasnya mengenai defisit produksi dapat dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut:

Gambar 4. Surplus/Defisit Beras menurut *Subround* di Kab. Sidoarjo Tahun 2020–2021

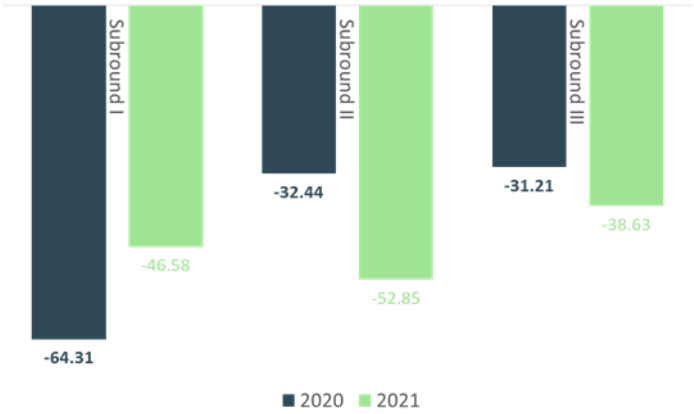

Sumber: Hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Tahun 2021

3 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah. Nilai PDRB dan dinamikanya menjadi sangat penting untuk diperhatikan sebagai bahan evaluasi ditengah ketidakpastian perekonomian pasca pandemi Covid-19. Selain untuk meilihat nilai, distribusi, dan pertumbuhan, dengan nilai PDRB kita dapat mengklasifikasikan lapangan usaha menjadi kelompok basis dan potensial.

Pada masa pandemi Covid-19 terjadi kontraksi pertumbuhan hampir di sebagian besar kategori lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2021 mencapai 210,64 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 13 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 197,24 triliun rupiah. Kenaikan tersebut dipengarui oleh meningkatnya aktivitas perekonomian pasca terjadi pandemi Covid-19.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 135,31 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 141 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 ekonomi Kabupaten Sidoarjo tumbuh sebesar 4,21 persen.

Struktur Perekonomian Kabupaten Sidoarjo

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2017–2021) struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi dan Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Tabel 4 peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 51,97 persen (angka tertinggi selama 5 tahun terakhir). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 16,83 persen (meningkat dari 16,02 persen di tahun 2020). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,63 persen, disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,14 persen (turun dari 7,40 persen di tahun 2020) dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 3,80 persen.

Tabel 4. Distribusi Produk Domestik Reginal Bruto ADHB Kab. Sidoarjo Tahun 2020–2021

Kategori	Uraian	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.25	2.13
B	Pertambangan dan Penggalian	0.06	0.06
C	Industri Pengolahan	51.17	51.97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.85	0.85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	0.07	0.07
F	Konstruksi	8.68	7.63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Repar-	16.02	16.83
H	Transportasi dan Pergudangan	7.40	7.14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.41	3.55
J	Informasi dan Komunikasi	3.86	3.80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.24	1.21
L	Real Estate	0.99	0.95
M,N	Jasa Perusahaan	0.16	0.16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.93	1.84
P	Jasa Pendidikan	1.25	1.18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.34	0.35
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.31	0.31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2021

Pada tahun 2021, di antara kelima lapangan usaha tersebut, ada 2 kategori yang mengalami peningkatan peranan, yaitu Industri Pengolahan, dan perdagangan besar dan eceran. Tiga sektor lainnya mengalami penurunan yaitu sektor konstruksi, informasi dan komunikasi, serta transportasi dan pergudangan. Sementara itu, peranan lapangan usaha selain lima usaha tersebut, masing-masing kurang dari 4 persen.

Salah satu penyebab menurunnya peranan konstruksi adalah adanya *re-focusing* anggaran untuk pemulihan ekonomi, himbauan tersebut membuat pemerintah daerah melakukan realokasi dan menfokuskan ke subsidi sektor produktif dan masyarakat yang dampak ekonominya dapat langsung dirasakan ole masyarakat luas. Selain itu, harga rumah dan nilai investasinya berturut-turut mengalami penurunan sehingga perkembangan sektor tersembut mengalami perlambatan.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Gambar 5. Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Positif di Kab. Sidoarjo Tahun 2020—2021

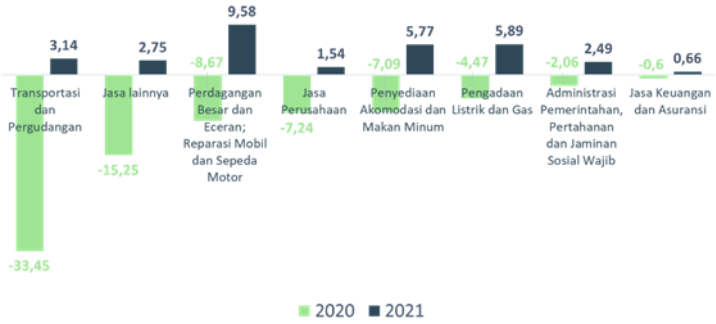

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2021

Banyak pakar ekonomi memprediksi bahwa 2021 menjadi titik balik pemulian ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pemulian ekonomi Kabupaten Sidoarjo dimulai taun 2021, ditandai dengan pertumbuhan positif sektor-sektor yang sebelumnya terkontraksi. Terdapat 8 sektor yang mulai mengalami perbaikan, beberapa diantaranya trasportasi dan pergudangan; jasa lainnya; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; jasa perusahaan; penyediaan akomodasi dan makan minum; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; serta jasa keuangan dan asuransi. Sektor dengan pemulihan paling signifikan adalah sektor transportasi dan pergudangan dimana pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 33,45 persen dan tumbuh menjadi 3,14 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai angka di atas 9 persen dicapai oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,58 persen. Lapangan usaha dengan pertumbuhan terbesar kedua dengan pertumbuhan masing-masing diatas 5 persen adalah pengadaan listrik dan gas serta lapangan usaha penyedia akomodasi makan minum.

Prediksi pemulihan ekonomi dibuat berdasarkan aktivitas masyarakat yang mulai berangsur normal baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Kondisi tersebut menjadi *multiplier effect* sektor-sektor lainnya di Kabupaten Sidoarjo. Mobilitas yang tinggi akan menuntut penggunaan jasa transportasi lebih tinggi atau meningatkan perdagangan kendaraan dan juga reparasinya, diikuti peningkatan berbagai sektor pendukungnya.

Gambar 6. Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Negatif (Kontraksi) di Kab. Sidoarjo Tahun 2020—2021

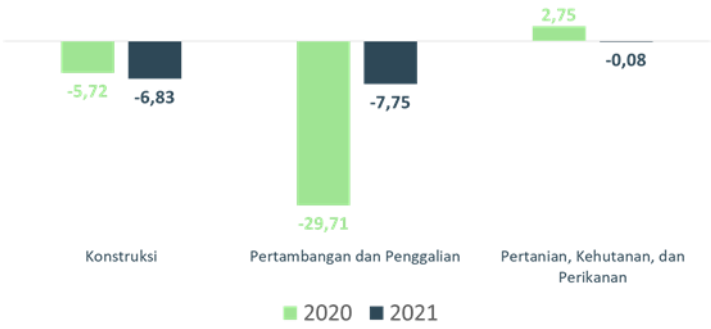

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2021

Pemulian ekonomi tidak serta merta menjadikan semua sektor lapangan usaha tumbuh positif, masih ada tiga sektor lapangan usaha di Kabupaten Sidaorjo yang

mengalami kontraksi. Tiga Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam diantaranya konstruksi; pertambangan dan penggalian; serta pertanian, keutanan, dan perikanan. Kontraksi pada sektor konstruksi disebabkan oleh re-focusing anggaran untu penanganan dan pemulihan Covid-19, selain kondisi ekonomi dan investasi yang masih belum stabil akibat pandemi juga menjadi penyebabnya.

Laju pertumbuhan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel % sebagai berikut:

Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Sidoarjo Tahun 2020—2021

Kategori	Uraian	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.75	-0.08
B	Pertambangan dan Penggalian	-29.71	-7.75
C	Industri Pengolahan	0.98	4.90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-4.47	5.89
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.57	6.30
F	Konstruksi	-5.72	-6.83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Repar-asi Mobil dan Sepeda Motor	-8.67	9.58
H	Transportasi dan Pergudangan	-33.45	3.14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7.09	5.77
J	Informasi dan Komunikasi	7.57	4.90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0.60	-0.66

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2021

Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Sidoarjo Tahun 2020—2021 (Lanjutan)

Kategori	Uraian	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
L	Real Estate	2.79	1.48
M,N	Jasa Perusahaan	-7.24	1.54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2.06	2.49
P	Jasa Pendidikan	2.94	0.45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.30	4.53
R,S,T,U	Jasa lainnya	-15.25	2.75
	PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-3.69	4.21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2021

Analisis *Location Quotient* (LQ) dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis Location Quotient (LQ) merupakan suatu metode statistik yang menggunakan karakteristik output/nilai tambah atau kesempatan kerja untuk menganalisis dan menentukan keberagaman dari basis ekonomi (economic base) masyarakat daerah/lokal (Arsyad, 1999). Sementara itu yang termasuk kedalam basis ekonomi masyarakat adalah sektor-sektor yang memiliki karakteristik menyangkut tentang pendapatan dan kesempatan kerja. Analisis LQ memberikan kerangka pengertian tentang stabilitas dan fleksibilitas perekonomian masyarakat untuk merubah kondisi melalui penyelidikan terhadap derajat industri-industri/sektor-sektor yang ada dilingkungan masyarakat (Heilbrun, 1987 dalam Kharisma dan Hardiyanto, 2020).

Analisis LQ sering digunakan untuk mengestimasi industri ekspor atau basic industry, dimana industri tersebut memiliki karakteristik dapat membawa sejumlah unit uang kepada masyarakat melalui ekspor barang dan jasa, industri yang seperti ini kemudian dikenal dengan nama industri-industri basis (*basic industries*). Sementara itu industri-industri yang bergerak men-*supply* barang dan jasa untuk kegunaan konsumsi lokal/daerah dinamakan sebagai industri-industri non basis.

Tabel 6. Analisis *Location Quotient* (LQ) Menurut Lapangan Usaha Kab. Sidoarjo Tahun 2020—2021

Uraian	2020		2021	
	LQ	Ket-erangan	LQ	Ket-erangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.19	Non Basis	0.18	Non Basis
Pertambangan dan Penggalian	0.02	Non Basis	0.02	Non Basis
Industri Pengolahan	1.67	Basis	1.69	Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	2.88	Basis	2.87	Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.71	Non Basis	0.71	Non Basis
Konstruksi	0.93	Non Basis	0.84	Non Basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.89	Non Basis	0.91	Non Basis
Transportasi dan Pergudangan	2.47	Basis	2.46	Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.61	Non Basis	0.64	Non Basis

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2021

Tabel 6. Analisis *Location Quotient* (LQ) Menurut Lapangan Usaha Kab. Sidoarjo Tahun 2020—2021 (lanjutan)

Uraian	2020		2021	
	LQ	Ket-erangan	LQ	Ket-erangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Informasi dan Komunikasi	0.75	Non Basis	0.72	Non Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.46	Non Basis	0.45	Non Basis
Real Estate	0.56	Non Basis	0.55	Non Basis
Jasa Perusahaan	0.20	Non Basis	0.19	Non Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.77	Non Basis	0.79	Non Basis
Jasa Pendidikan	0.44	Non Basis	0.44	Non Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.48	Non Basis	0.48	Non Basis
Jasa lainnya	0.25	Non Basis	0.25	Non Basis

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 6, didapatkan hasil bahwa pada tahun 2020–2021, sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari 1 adalah sektor Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Transportasi dan Pergudangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo atau dapat disebut sektor basis. Ketiga sektor tersebut menjadi sektor yang memiliki keunggulan komparatif, dimana hasil dari ketiga sektor tersebut tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan di wilayah Kabupaten Sidoarjo saja, namun juga dapat

berpotensi untuk diekspor ke wilayah lainnya. Sementara itu, sektor selain Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik, serta Transportasi dan Pergudangan memiliki nilai LQ kurang dari 1 yang berarti bahwa produksi pada sektor-sektor tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri di wilayah Kabupaten Sidoarjo, sehingga diperlukan pasokan atau impor dari wilayah lain.

Berdasarkan Tabel 6 juga didapatkan hasil bahwa pada tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari 1 tetap didominasi oleh sektor Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Transportasi dan Pergudangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut menjadi sektor basis atau sumber pertumbuhan ekonomi yang resisten di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 7. Analisis MRP (Model Rasio Pertumbuhan) Menurut Lapangan Usaha Kab. Sidoarjo Tahun 2020—2021

Kat	Lapangan Usaha	2020		2021	
		RPs	RPr	RPs	RPr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.72	-0.43	-0.05	0.49
B	Pertambangan dan Penggalian	8.44	1.51	1.73	-1.25
C	Industri Pengolahan	-0.48	0.88	1.46	0.94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.87	1.03	1.01	1.63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.91	-2.16	1.11	1.59

Keterangan: Nilai RPs/RPr > 1

Tabel 7. Analisis MRP (Model Rasio Pertumbuhan) Menurut Lapangan Usaha Kab. Sidoarjo Tahun 2020—2021 (lanjutan)

Kat	Lapangan Usaha	2020		2021	
		RPs	RPr	RPs	RPr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
F	Konstruksi	1.74	1.41	-2.70	0.71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.50	2.48	1.22	2.19
H	Transportasi dan Pergudangan	3.24	4.43	1.26	0.70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.80	3.80	1.88	0.86
J	Informasi dan Komunikasi	0.77	-4.22	0.71	1.93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-3.36	-0.08	0.40	0.46
L	Real Estate	0.71	-1.70	0.65	0.64
M,N	Jasa Perusahaan	1.00	3.10	0.65	0.66
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.29	0.17	8.59	0.08
P	Jasa Pendidikan	0.74	-1.70	0.36	0.35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.97	-3.66	0.91	1.39
R,S,T, U	Jasa lainnya	1.11	5.92	0.48	1.62

Keterangan: Nilai RPs/RPr > 1

Berdasarkan Table 7, klasifikasi kegiatan perekonomian menurut nilai RPr dan RPs periode 2021 adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi 1, yaitu nilai RPr (+) dan RPs(+) berarti sektor tersebut pada tingkat provinsi dan kabupaten memiliki pertumbuhan menonjol terdapat pada sektor

pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang limbah; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

- Klasifikasi 2, yaitu nilai RPr (+) dan RPs(-) berarti sektor tersebut pada tingkat provinsi menonjol namun pada tingkat kabupaten belum menojol, dimana terdapat pada sektor informasi dan komunikasi; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya.
- Klasifikasi 3, yaitu nilai RPr (-) dan RPs(+) berarti sektor tersebut pada tingkat kabupaten menonjol namun pada tingkat provinsi belum menonjol, dimana terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi makan minum; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.
- Klasifikasi 4, yaitu RPr (-) dan RPs (-) berarti sektor tersebut pada tingkat kabupaten maupun provinsi memiliki tingkat pertumbuhan yang belum menonjol, dimana terdapat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi; jasa keuangan dan asuransi; real estat; jasa perusahaan; dan jasa pendidikan.

Tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat transformasi dari beberpa sektor lapangan usaha selama periode waktu 2020 ke 2021. Pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang limbah contohnya, bertransformasi dari sektor yang tidak menonjol secara kabupaten dan provinsi menjadi sektor yang menonjol baik secara kabupaten maupun provinsi. Transformasi yang cukup signifikan tersebut berkaitan erat dengan aktivitas masyarakat yang kembali normal, dari yang tadinya *Work From Home* menjadi *Work From Office*, dari sekolah daring menjadi sekolah luring, perus-

ahaan yang tutup menjadi buka kembali, serta bermunculan perusahaan-perusahaan baru sepanjang tahun 2021. Transformasi kegiatan tersebut yang membuat pertumbuhan pengadaan air, pengelolaan sampa, dan daur ulang menjadi lebih pesat. Jika saat pandemi aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas rumah tangga, maka tahun 2021 aktivitas tersebut menjadi lebih luas membutuhkan air dan menghasilkan sampah/limbah dengan jumlah yang berbeda pula.

Jika dilihat dari pertumbuhan Kabupaten Sidoarjo (RPs) saja, sektor yang berubah dari menonjol menuju tidak menonjol adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi; dan jasa lainnya. Label sektor resisten terhadap pandemi tetap bisa mengalami perubahan, perubaan pada sektor pertanian disebabkan oleh terjadinya banyak gagal panen akibat serangan hama dan cuaca yang kurang menentu sehingga secara pertumbuhan jika dibandingkan tahun sebelumnya akan mengalami penurunan.

Namun, terdapat juga sektor lapangan usaha yang bertransformasi dimana pada tahun 2020 tidak menonjol menjadi menonjol pada tahun 2021. Sektor-sektor tersebut adalah industri pengolaan; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang limbah; dan jasa perusahaan. Sektor industri dan jasa perusahaan merupakan beberapa sektor yang terdampak dari pemulihan ekonomi dan aktivitas masyarakat. Perusahaan industri kembali normal dengan pertumbuhan yang baik, sementara sektor jasa perusahaan juga ikut tumbuh sebagai dampak meningkatnya aktivitas perusahaan khususnya sektor industri.

Hasil anlisis LQ dan MRP juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan sektor mana saja yang memiliki keuanggulan komparatif. Suatu sektor dikatakan memiliki

keunggulan komparatif jika memiliki nilai RPs dan LQ lebih dari 1, selengkapnya disajikan dalam Tabel 8 dibawah ini.

Berdasarkan Tabel 8, untuk tahun 2021 sektor yang memiliki keuanggulan komparatif di Kabupaten Sidoarjo adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang limbah serta sektor transportasi dan pergudangan. Terhitung selama pandemi, sektor transportasi dan pergudangan bertahan menjadi sektor dengan keunggulan komparatif. Selama pandemi aktivitas yang selalu dibutuhkan masyarakat seperti pergudangan untuk kebutuhan sehari-hari, distribusi kebutuhan sehari-hari, sampai kebiasaan belanja secara *online* untuk menghindari kontak fisik dan budaya belanja praktis. Selain dikategorikan sebagai sektor dengan keunggulan komparatif, kedua sektor tersebut merupakan sektor sumber pertumbuhan utama di Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2020–2021.

Sektor lainnya yang termasuk kedalam sektor dengan keungulan komparatif tahun 2021 adalah sektor industri pengolahan. Pada taun 2020 sektor ini tidak sektor dengan keunggulan komparatif, tahun 2020 sektor industri pengolahan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan tahun sebelumnya dan juga wilayah provinsi. Setelah tubuh sebesar 4,90 persen pada tahun 2021, industri pengolahan menjadi sektor dengan keunggulan komparatif.

Analisis keunggulan komparatif (LQ dan MRP) juga dapat digunakan sebagai evaluasi pembangunan dimana semakin banyak jumlah sektor yang masuk ke dalam sektor dengan keunggulan komparatif maka pembangunan akan semakin berhasil.

Tabel 8. *Location Quotient* (LQ) Analisis MRP (Model Rasio Pertumbuhan) menurut Lapangan Usaha Kab. Sidoarjo Tahun 2020—2021

Kategori	Lapangan Usaha	2020		2021	
		RPs	LQ	RPs	LQ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.72	0.19	-0.05	0.18
B	Pertambangan dan Penggalian	8.44	0.02	1.73	0.02
C	Industri Pengolahan	-0.48	1.67	1.46	1.69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.87	2.88	1.01	2.87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.91	0.71	1.11	0.71
F	Konstruksi	1.74	0.93	-2.70	0.84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.50	0.89	1.22	0.91
H	Transportasi dan Pergudangan	3.24	2.47	1.26	2.46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.80	0.61	1.88	0.64
J	Informasi dan Komunikasi	0.77	0.75	0.71	0.72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-3.36	0.46	0.40	0.45
L	Real Estate	0.71	0.56	0.65	0.55
M,N	Jasa Perusahaan	1.00	0.20	0.65	0.19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.29	0.77	8.59	0.79
P	Jasa Pendidikan	0.74	0.44	0.36	0.44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.97	0.48	0.91	0.48
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.11	0.25	0.48	0.25

Keterangan: Nilai RPs/RPr > 1

4 Gini Ratio

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi langsung memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya secara menyeluruh. Hasil pembangunan seharusnya dapat dinikmati secara "merata" oleh seluruh penduduk di daerah tersebut. Diperlukan kebijakan untuk penyiapan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi agar mampu berkompetisi pada pasar kerja yang tersedia diharapkan akan mengurangi kesenjangan terhadap distribusi hasil pembangunan yang ada. Salah satu indikator yang dianggap bisa memberikan gambaran mengenai tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang ada di suatu daerah adalah indeks Gini (*Gini Rasio*).

Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36. Gini rasio kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berada pada kisaran 0.30, artinya Kabupaten Sidoarjo masuk dalam kategori ketimpangan distribusi pendapatan rendah.

Gambar 6. Gini Rasio Kab. Sidoarjo Tahun 2020—2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2021

Berdasarkan Gambar 7 tren nilai gini ratio pada tahun 2016 mulai mengalami penurunan hingga tahun 2019, hal tersebut menandakan bahwa selama periode tersebut ketimpangan pendapatan penduduk di Kab. Sidoarjo terus mengalami penurunan. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan tingkat ketimpangan adalah keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan kebijakan pengalokasian anggaran untuk sektor-sektor penting penunjang kesejahteraan masyarakat.

Kondisi tersebut berubah pada tahun 2021, pandemi Covid-19 membuat masyarakat miskin dan rentan miskin semakin terpuruk. *Gap* pendapatan antar masyarakat semakin tinggi, hal tersebut yang menyebabkan nilai gini rasio Kab. Sidoarjo meningkat 0,01 satuan menjadi 0,35. Nilai gini rasio Kab. Sidoarjo tahun 2017–2021 berturut-turut adalah 0,34; 0,35; 0,31; 0,34 dan 0,35.

5 Hotel dan Pariwisata

Sektor lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum termasuk kedalam sektor yang mampu terbebas dari kontraksi pada periode sebelumnya di Kab. Sidoarjo. Pada tahun 2020 sektor penyediaan akomodasi makan minum mengalami kontraksi sebesar 7,09 persen dan pada periode 2021 sektor tersebut tumbuh signifikan yaitu sebesar 5,77 persen.

Salah satu komponen penting dalam sektor lapangan usaha penyedia jasa akomodasi makan dan makan minum di Kab. Sidoarjo adalah penyedia jasa perhotelan. Secara geografis wilayah Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai wilayah penyangga Kota Surabaya, kemudian objek-objek penting kegiatan perekonomian seperti terminal dan bandara juga berlokasi di Kab. Sidoarjo sehingga fasilitas penginapan menjadi *support system* yang utama.

Gambar 7. Tingkat Penghunian Kamar (%) Hotel Berbintang Kab. Sidoarjo Tahun 2020-2021

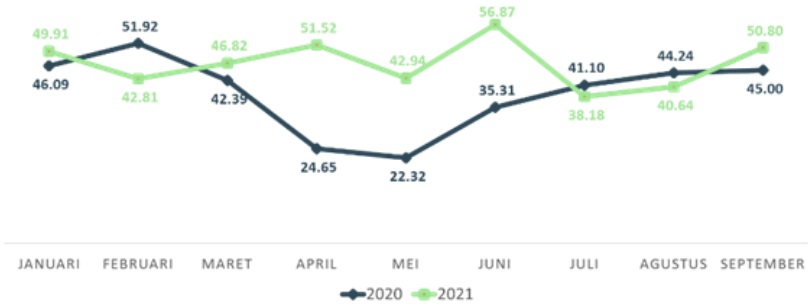

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2021

Gambar 12 menyajikan bagaimana perkembangan penghunian kamar hotel berbintang selama tahun 2020– 2021. Jika dibandingkan tahun 2020 dimana data disajikan bulanan, tren persentase penghunian kamar tahun 2021 lebih tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meredanya dampak pandemi Covid-19 dan penanganan pandemi yang baik oleh pemerintah daerah. Program vaksin gratis yang melampaui target membuat perekonomian di Kabupaten Sidoarjo pulih lebih cepat.

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja sub-sektor perhotelan adalah melalui Tingkat Penghunian Kamar (TPK). Jika diamati dengan seksama, pada tahun 2020 penurunan nilai TPK terjadi sejak bulan Maret 2020. Pada bulan tersebut, diumumkan kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia tepatnya pada tanggal 6 Maret 2020 sehingga secara nonformal terjadi pengurangan aktivitas luar ruangan oleh masyarakat baik domestik maupun internasional. Sedangkan pada tahun 2021, Tingkat

Penghunian Kamar (TPK) di Kabupaten Sidoarjo lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan tren yang positif meskipun menurun pada bulan juli. TPK tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 56,87 persen bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha.

Indikator selanjutnya yang dapat diamati adalah rata-rata lama menginap (Tabel 12). Pada tahun 2021 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) untuk hotel berbintang sebesar 46,72 persen dengan rata-rata lama menginap amu selama 2 hari untuk tamu asing dan domestik. Artinya, secara rata-rata dalam sebulan dari setiap 100 kamar yang tersedia pada hotel berbintang ada sebanyak 47 kamar yang terjual, dengan lamanya tamu menginap sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) hari.

Tabel 9. Rata-Rata Lama Menginap Tamu Luar Negeri dan Domestik Pada Hotel Berbintang Tahun 2021

NO	BULAN	RATA-2 LAMA TM MENGINAP		
		ASING	DOMES-TIK	JUMLAH
1.	JANUARI	3.00	1.94	1.95
2.	FEBRUARI	2.70	1.84	1.85
3.	MARET	4.95	1.49	1.50
4.	APRIL	4.89	1.62	1.63
5.	MEI	1.86	1.36	1.37
6.	JUNI	4.12	1.49	1.50
7.	JULI	7.00	1.69	1.71
8.	AGUSTUS	3.29	1.49	1.49
9.	SEPTEMBER	1.50	1.46	1.46

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2021

Kebijakan PSBB dan *lockdown* baik secara regional, nasional, maupun internasional yang sudah mulai ditiadakan pada tahun 2021 menyebabkan tren nilai TPK dan rata-rata lama menginap berubah. Meskipun tingkat TPK terus mengalami perbaikan, namun komposisi tamu asing yang menginap mengalami penurunan pada tahun 2020 misalnya rata-rata tamu asing menginap adalah 2,15 persen, turun menjadi 0,49 persen pada tahun 2021. Kondisi tersebut masih dipengarui oleh merebaknya virus Covid-19 dimana secara nasional angka penyebaran virus masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lainnya. Oleh sebab itu, beberapa wisatawan atau warga asing tidak melakukan perjalanan ke Indonesia salah satunya ke wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 10. Komposisi Tamu Hotel Berbintang Kab. Sidoarjo Tahun 2021

NO	BULAN	KOMPOSISI TAMU		
		ASING	DOMESTIK	JUMLAH
1.	JANUARI	0.41	99.59	100.00
2.	FEBRUARI	0.53	99.47	100.00
3.	MARET	0.40	99.60	100.00
4.	APRIL	0.36	99.64	100.00
5.	MEI	1.05	98.95	100.00
6.	JUNI	0.48	99.52	100.00
7.	JULI	0.39	99.61	100.00
8.	AGUSTUS	0.18	99.82	100.00
9.	SEPTEMBER	0.66	99.34	100.00
	Jumlah	0.49	99.51	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2021

6 Perhubungan

Letak Bandara Internasional yang berada di wilayah Kab. Sidoarjo memberikan keuntungan tertentu. Selain menambah pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi, letak strategis bandara internasional di Kab. Sidoarjo juga memberikan *multiplier effect* ekonomi yang menguntungkan diantaranya adalah penciptaan lapangan kerja baru diberbagai sektor dari mulai sektor transportasi, industri, akomodasi dan makan minum, jasa, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat gejolak penerbangan di Kab. Sidoarjo menjadi sangat penting untuk diamati.

Pada tahun 2019–2021 sektor penerbangan terus mengalami gejolak, dimulai dari kebijakan kenaikan Tarif Batas Atas (TBA) pada awal tahun 2019 hingga menyebabkan penurunan jumlah penumpang udara secara cukup signifikan. Pada tahun 2020, penerbangan nasional mengalami kontraksi akibat adanya PSBB dan *lockdown* guna memutus penyebaran virus Covid-19. Jika periode 2019 – 2020 kebijakan yang dibuat berdampak pada menurunnya permintaan, sebaliknya tahun 2021 kebijakan tentang angkutan udara bertujuan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan udara.

Penumpang angkutan udara secara berkala menunjukkan penurunan sejak diumumkannya Covid-19 oleh *United Nations* sejak Desember 2020, di Indonesia puncaknya terjadi pada April 2020. Jika dibandingkan secara *year-on-year* tiap bulannya, sejak bulan April jumlah penumpang pesawat udara tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif kecuali pada bulan Juli-Agustus yang merupakan puncak gelombang ketiga pandemi Covid-19.

Gambar 8. Jumlah Penumpang Pesawat Udara Tahun 2020—2021 dan Pertumbuhan Jumlah Penumpang Tahun (year-on-year) Kab. Sidoarjo

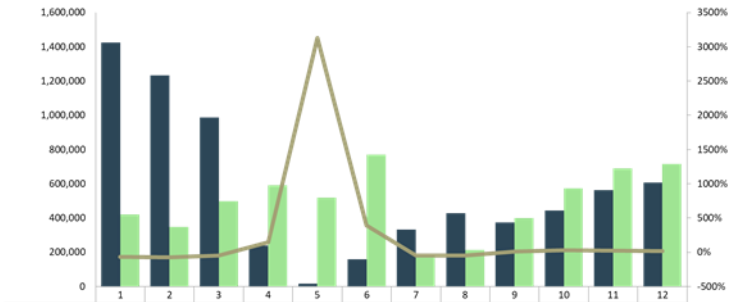

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL 2020	1,423,616	1,232,738	987,398	238,053	16,082	157,581	330,863	428,859	374,133	443,865	562,116	605,795
TOTAL 2021	420,351	347,992	496,913	590,232	519,048	770,368	172,893	213,612	400,227	572,554	689,948	715,699
PERSENTASE %	-70%	-72%	-50%	148%	3128%	389%	-48%	-50%	7%	29%	23%	18%

Sumber: Laporan Bulanan SUB-Trafik Angkasa Pura Tahun 2021

Jumlah penumpang mulai mengalami kenaikan pada bulan April–Juni dan September–Desember, meskipun persentase pertumbuhannya masih negatif untuk bulan Juli dan Agustus jika dibandingkan secara *year-on-year* pada tahun 2020. Pertumbuhan *year-on-year* masing-masing pada bulan April–Desember 2021 adalah 148 persen, 3128 persen, 389 persen, -48 persen, -50 persen, 7 persen, 29 persen, 23 persen, dan 18 persen.